

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONFLIK DALAM KEBIJAKAN MILITERISTIK RUSIA DI UKRAINA**

Salah satu isu internasional yang paling disoroti oleh masyarakat global sejak awal tahun 2022 adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Untuk melihat konteks politik dari perang saat ini, setidaknya terdapat tiga konsep yang penting untuk diperhatikan (Safranchuk, 2022). Pertama, kegagalan dari perjanjian Minsk (*Minsk Agreement*). Kedua, yaitu Perluasan NATO (*North Atlantic Treaty Organizations*). Terakhir, yaitu tentang dominasi Amerika Serikat dalam tatanan dunia. Konflik antara Rusia dan Ukraina mengancam keamanan dan stabilitas politik global, serta menjadi isu perang terbesar di wilayah Eropa pasca berakhirnya perang dingin. Bahkan, konflik ini dianggap menjadi penyebab utama dari adanya krisis ekonomi global. Banyak akademisi di bidang politik dan hubungan internasional memperdebatkan beberapa kemungkinan terkait faktor di balik kebijakan invasi Rusia.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka bab ini akan terbagi dalam beberapa bagian yaitu eskalasi konflik pasca terjadinya aneksasi Krimea; perkembangan invasi Rusia secara sistematis; faktor invasi Rusia dalam pendekatan Europasentris; serta kesimpulan.

#### **2.1 Eskalasi Konflik Pasca Aneksasi Krimea**

Unsur sejarah antara Rusia dan Ukraina memang menjadi suatu hal yang menarik untuk disoroti jika menganalisa terkait kebijakan yang diambil Rusia beberapa tahun kebelakang hingga saat ini. Mengutip dari pernyataan Presiden

Vladimir Putin di bulan Mei tahun 2014 melalui kanal TV Bloomberg, ia mengatakan:

*“Bahasa Rusia, Agama Rusia, dan Kristen Orthodox lahir di wilayah Ukraina saat ini berada. Kita telah menjadi satu bangsa sejak lebih dari 300 tahun yang lalu. Bangsa Slavia juga telah membawa kepercayaan agamanya dari lebih 1.000 tahun yang lalu. Jadi sangat tidak mungkin untuk melewati perasaan psikologis, historis, dan kekeluargaan.”*  
(Bloomberg, 2014).

Melalui pernyataan tersebut maka secara tersirat Putin mengatakan bahwa Ukraina merupakan bagian dari Rusia dan tidak menganggap Ukraina sebagai negara merdeka yang bebas. Akhirnya, pada tahun 2014 Rusia melakukan aneksasi dengan tindakan ilegal yang melanggar integritas teritorial pasca keruntuhan Uni Soviet. Akibatnya hampir 2 juta orang menjadi pengungsi dan banyak fasilitas publik yang hancur karena perang yang terjadi untuk memperebutkan Krimea.

Melalui konferensi pers, Presiden Vladimir Putin membenarkan tindakan aneksasi tersebut dan mengatakan bahwa wilayah Krimea mayoritas merupakan etnis Rusia. Pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta, melalui laporan dari *The Unrepresented Nations & People Organization* (UNPO) etnik yang mendiami wilayah Krimea mayoritas merupakan bangsa Rusia. Statistik dari pembagian etnik tersebut yaitu Etnik Rusia (58,3%), Etnik Ukraina (24,3%), Etnik Tatar Krimea (12,1%), Etnik Belarus (1,4%), dan etnis minoritas lainnya yang terdiri dari Armenia, Bulgaria, Jerman, Yunani, dan Karaim (UNPO, 2017). Bukti

tersebut menjadi salah satu alasan Putin untuk menganeksasi wilayah Krimea di tahun 2014. Rusia menjadi etnis mayoritas di wilayah Krimea merupakan dampak dari adanya transmigrasi yang dilakukan Presiden Stalin pada masa Uni Soviet khususnya saat adanya sistem pertanian kolektif. Hal ini dilakukan untuk menyebarkan kemampuan terkait sistem perairan dalam pertanian kolektif yang dilakukan di wilayah Ukraina saat awal bergabung dalam Uni Soviet.

Presiden Uni Soviet, Joseph Stalin, menciptakan sebuah sistem pertanian kolektif guna meningkatkan perekonomian Uni Soviet di awal masa pembentukan. Sistem yang dibentuk memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti menciptakan wabah kelaparan dan kematian masal pada masyarakat Ukraina. Disamping itu, adanya transmigrasi yang dilakukan Stalin untuk memindah beberapa masyarakat Rusia dan wilayah lainnya untuk membantu terkait sistem perairan dalam pertanian menjadi salah satu akar permasalahan yang akan timbul di masa depan. Perpindahan penduduk ke Ukraina ini juga menjadi upaya untuk mengisi kekosongan wilayah akibat banyaknya masyarakat Ukraina yang telah meninggal akibat perang saudara maupun sistem pemerintahan yang buruk selama awal bergabung dengan Uni Soviet (Conant, 2022).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Presiden Stalin mengisi wilayah Krimea dengan penduduk dari Rusia untuk membantu sistem perairan dalam pertanian wilayah Krimea. Hal tersebut membuat masyarakat asli wilayah Krimea, Etnis Tatar dan sedikit masyarakat Ukraina, menjadi penduduk minoritas di wilayah Krimea. Selain itu, kematian masal penduduk Ukraina di awal diberlakukannya sistem pertanian kolektif juga menjadi alasan mengapa

masyarakat Rusia akhirnya menjadi penduduk mayoritas di wilayah Krimea. Berdasarkan asumsi tersebut, Putin mengklaim bahwa wilayah Krimea diisi oleh masyarakat etnis asli Rusia (Popovici, 2022).

Aneksasi Krimea terjadi pada 20 Februari hingga 21 Maret 2014. Tindakan pemisahan Krimea dari Ukraina tersebut sebagai hasil dari referendum yang diambil di wilayah Krimea. Sesuai dengan pemungutan suara yang dilakukan pada masyarakat Krimea, lebih dari 90% hasil voting memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung pada Rusia (BBC, 2014). Meskipun hasil voting tersebut sudah disetujui langsung oleh pemimpin Krimea, EU dan AS menilai bahwa hasil tersebut merupakan hasil yang tidak valid dan ilegal. Dugaan ini muncul karena EU dan AS menilai adanya pihak yang memecah belah serta memprovokasi dalam pemungutan suara (BBC, 2014).

Disamping adanya proses voting, Perjanjian antara Rusia dan masyarakat *Pro-Russia* yang berada di wilayah Krimea juga menjadi dasar penganeksasian wilayah oleh Rusia (Grant, 2015). Pemerintahan Ukraina yang tidak stabil menyebabkan timbulnya demonstrasi di jalanan wilayah Kyiv atas dugaan ketidakadilan yang diterima masyarakat (CNBC, 2022). Ketidakadilan tersebut menjadi alasan utama mengapa banyak masyarakat Krimea yang akhirnya tergabung dalam kelompok *Pro-Russia*.

Pada tanggal 19 Februari 2014, lebih dari 50 aktivis turun ke jalanan di daerah Yalta, sebuah kota di Krimea, untuk menggulingkan presiden Viktor Yanukovych. Menurut para aktivis yang melakukan demonstrasi tersebut, pemerintahan Ukraina menjadi tidak stabil dan ketidakadilan terjadi di berbagai

wilayah di Ukraina (Pravda, 2014). Sehari setelahnya, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2014, operasi militer Rusia resmi dimulai. Lebih dari 100 orang meninggal dunia pada hari pertama operasi militer tersebut diberlakukan. 23 Februari menjadi awal mula ketakutan akan gerakan separatisme *Pro-Russian* berkembang di wilayah Krimea. Bendera Rusia dikibarkan di depan *Sevastopol City Hall* oleh protestan dengan meneriakkan “*Russia, Russia, Russia*”.

Seiring berkembangnya konflik, pada tanggal 26 Februari militer Rusia mengambil alih jalan utama menuju Sevastopol (Mackinnon, 2014). Presiden Vladimir Putin meminta Yanukovych untuk menyerahkan Krimea kepada Rusia tanpa adanya intervensi militer atau Rusia akan menyerang seluruh wilayah Ukraina. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Presiden Ukraina. Pada awal Maret, situasi konflik semakin memanas ditunjukkan melalui dilarangnya jurnalis atau awak media Ukraina untuk memasuki wilayah Krimea. Setelah beberapa waktu, Putin akhirnya menarik mundur pasukannya dari perbatasan Ukraina pada tanggal 4 Maret 2014. Hal tersebut mendinginkan situasi yang memanas antara kedua negara, bersamaan dengan ini Rusia menyetujui ajakan NATO untuk mengadakan perundingan dan membuka peluang cara diplomatik untuk menyelesaikan perang (CBC, 2014).

*The Crimean Parliament* (Dewan Parlemen Krimea) pada tanggal 6 Maret memutuskan untuk secara resmi kembali bergabung dalam federasi Rusia setelah lebih dari 60 tahun menjadi bagian dari negara Ukraina (BBC, 2014). Referendum akan dilakukan jika disetujui oleh Rusia, disamping itu, Refat Chubarov selaku ketua dari organisasi perkumpulan masyarakat etnis Tatar Krimea mengatakan

bahwa anggota organisasi tersebut tidak akan mengambil bagian dalam proses referendum tersebut (Rfe/RI, 2014).

Situasi kembali memanas pasca Rusia kembali menutup akses menuju Krimea dan menyerang menggunakan senjata api pada tanggal 8 Maret. Serangan bahkan juga terjadi di sebuah rumah sakit utama Kota Simferopol, sebuah kota di Krimea (Grytsenko, 2014). Referendum Krimea dianggap ilegal dan tidak sah oleh berbagai pihak, seperti OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*) dan *European Parliament* (Dahl, 2014). Pada tanggal 13 Maret, *The Russian Armed Forces* mengumumkan latihan militer di daerah Rostov, Belgorod, dan Kursk. Latihan tersebut meliputi senjata tembak, helikopter serang, dan tentara kurang lebih berjumlah 10.000 orang (New York Times, 2014).

Krimea mengadakan pemungutan suara pada 16 Maret untuk menentukan bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi bagian dari Ukraina sesuai dengan Konstitusi 1992. Setelah pemungutan suara dilakukan, hasil dari voting tersebut mayoritas suara menginginkan untuk bergabung pada Rusia. Sehari setelah proses pemungutan suara, Dewan Parlemen Krimea secara sah mendeklarasikan diri bergabung dengan Rusia dan merdeka dari Ukraina.

Pada 18 Maret 2014, sebuah perjanjian antara Rusia dan Krimea ditandatangani di Kremlin oleh empat aktor negara, diantaranya Presiden Rusia Vladimir Putin; Ketua Dewan Negara Krimea Vladimir Konstantinov; Perdana Menteri Krimea Sergei Aksyonov; dan Gubernur Sevastopol Alexei Charly. Perjanjian ini merupakan hasil dari referendum yang dilakukan sebelumnya di Krimea pada 16 Maret. Melalui perjanjian tersebut, Krimea memiliki dua

konstitusi baru yaitu Republik Krimea dan Kota Federal Sevastopol. Isi dari perjanjian tersebut secara garis besar adalah pembentukan sistem pemerintahan yang baru dengan memperhatikan masa transisi dari Krimea (Putin, 2014).

### **Gambar 2.1**

#### **Penandatanganan Perjanjian antara Rusia dan Krimea di Kremlin, Moskow**



*Sumber: Official Internet Resources of the President of Russia*

Setelah proses panjang aneksasi Krimea, pada tanggal 24 Maret beberapa negara anggota *G8* memvoting untuk menanggukhan Rusia sebagai anggota *G8*. Negara tersebut yaitu Jerman, Italia, Kanada, Perancis, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (New York Times, 2014). Pada 27 Maret, Majelis Umum PBB mengesahkan bahwa pemungutan suara Krimea merupakan referendum yang ilegal. 100 negara memvoting setuju atas pernyataan tersebut dan menegaskan Krimea sebagai wilayah teritorial Ukraina, 11 negara memvoting tidak setuju, dan 58 negara memilih absen dalam voting (BBC, 2014).

Akhirnya pada 29 Maret 2014, Krimea resmi mengubah lokasi waktunya menjadi sama dengan Moskow yaitu Waktu Eropa Timur (Business Standard,

2014). Konflik Aneksasi Krimea resmi berakhir, kejadian ini menjadi sebuah sejarah baru dalam hubungan antara Rusia dan Ukraina. Beberapa perjanjian masa lalu antara Rusia dan Ukraina gagal setelah terjadinya konflik tersebut. Salah satu perjanjian tersebut adalah Pakta Kharkiv. Lalu, disamping gagalnya Pakta Kharkiv, pasca aneksasi Krimea juga tercetus kembali sebuah perjanjian untuk mengakhiri eskalasi konflik, perjanjian tersebut disebut sebagai *Minsk Agreement*.

Setelah keruntuhan Uni Soviet, Rusia dan Ukraina memiliki sebuah perjanjian di tahun 1997 yang berisi perizinan bagi Rusia untuk mempertahankan pasukan laut hitamnya di Sevastopol, sebuah kota di Semenanjung Krimea yang berhadapan langsung dengan Laut Hitam, yang berlaku dibawah perjanjian kedua negara hingga tahun 2042 (Popovici, 2022). Perjanjian ini disebut sebagai *Kharkiv Pact* atau Pakta Kharkiv, yang mana merupakan lanjutan atau perpanjangan dari kesepakatan kerjasama antara Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak tahun 1990-an (Yudha, 2017). Pada awal kerjasama antara kedua negara, Armada Laut Hitam Rusia dikehendaki boleh menempati Sevastopol hingga tahun 2017. Namun, pada tahun 2010 tepatnya bulan April, Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mencapai sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, masa berlaku *Kharkiv Pact* yang harusnya berakhir pada tahun 2017 diperpanjang hingga tahun 2042, hal ini termasuk opsi tambahan perpanjangan lima tahun dengan kompensasi yaitu Rusia harus menyediakan sumber daya gas alam yang dimiliki untuk Ukraina (Astrov,



2011). Namun, setelah peristiwa aneksasi Krimea yang terjadi di tahun 2014, Rusia secara sepihak menghentikan perjanjian tersebut.

Pasca aneksasi Krimea, lahirlah sebuah perjanjian baru yang disebut sebagai perjanjian Minsk. Perjanjian Minsk (*Minsk Agreement*) merupakan sebuah perjanjian antara kelompok separatisme Rusia, pasukan militer Ukraina, dan pasukan militer Rusia sebagai peran sentral (Galeotti, 2019). Perjanjian ini ditandatangani pasca aneksasi Krimea untuk mengakhiri perang Donbas. Perjanjian Minsk pertama terjadi pada September 2014 yang disetujui oleh Ukraina dan gerakan separatisme dari Rusia. Isi dari perjanjian tersebut berupa gencatan senjata dengan 12 poin pokok, pertukaran tahanan, saling bertukar bantuan kemanusiaan, dan penghapusan kekerasan bersenjata besar (Aljazeera, 2022). Namun, perjanjian Minsk yang pertama tidak berlangsung dengan baik karena terdapat pelanggaran dari kedua belah pihak.

Selanjutnya, Perjanjian Minsk kedua terjadi pada Februari 2015 yang ditandatangani oleh pihak Ukraina, perwakilan dari Rusia, Presiden Jerman, Presiden Perancis, dan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE). Inti dari 13 poin yang terdapat dalam perjanjian kedua tersebut adalah pemberhentian konflik antara Ukraina dan Rusia (United Nations, 2015). Perjanjian Minsk resmi gagal setelah Presiden Vladimir Putin melakukan Agresi militer pada awal tahun 2022 dan menyebut Ukraina sebagai pihak penyebab dari gagalnya perjanjian antara kedua negara (BBC, 2022).

## 2.2 Perkembangan Invasi Rusia Secara Sistematis

Pada 24 februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Seorang pensiunan Perwira Rusia, Vladimir Kvachkov, memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari operasi militer khusus yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina di tahun 2022 (McDermott & Bartles, 2022). Menurutnya, tujuan politik dan militer yang dilakukan dalam operasi militer khusus dicapai melalui pendekatan yang lebih langsung dibanding serangan militer lainnya. Sehingga hasil yang dicapai dalam operasi militer khusus akan menentukan bagaimana strategi serangan secara militer selanjutnya.

Operasi militer tersebut diawali dengan himbauan dari Kementerian Pertahanan Rusia yang meminta penerbangan udara Ukraina untuk berhenti, pembatasan penerbangan bagi pesawat non-sipil, dan penetapan zona konflik aktif oleh *European Union Aviation Safety Agency* (Eccles, 2022). Selang beberapa saat setelah pengumuman operasi militer khusus oleh Presiden Rusia dipublikasikan, ledakan terjadi di wilayah Kyiv, Kharkiv, Odessa, dan Donbas pada dini hari waktu setempat (Sheftalovich, 2022).

Setelah serangan udara diletuskan, kendaraan militer darat Rusia mulai memasuki wilayah Ukraina melalui Senkivka, sebuah perbatasan antara Rusia Ukraina dan Belarus (CNN, 2022). Meskipun publikasi mengenai operasi militer belum tepat 24 jam, namun militer Rusia telah menyerang secara luas khususnya di daerah perbatasan seperti Mariupol (VOX, 2022). Invasi Rusia di hari pertama menghancurkan banyak infrastruktur dan menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menetapkan mobilisasi militer

secara nasional dan melarang warga Ukraina laki-laki yang berusia 18 sampai 60 tahun meninggalkan batas negara (Business Insider, 2022).

Pada tanggal 25 Februari, tepatnya pada pukul 4 dini hari, dua buah rudal meledak di daerah ibu kota Ukraina, Kyiv (CNN, 2022). Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa militer Rusia telah memasuki wilayah Obolon, Kyiv yang berada di dekat *Verkhovna Rada Building*, tempat parlemen Ukraina melakukan sidang terkait pemerintahan (New York Times, 2022). Setelah militer Rusia memasuki wilayah Kyiv, Presiden Ukraina meminta warga untuk mempersiapkan bom molotov, yaitu senjata rakitan yang dibuat dari bahan yang mudah terbakar lalu diberikan sumbu dan cara penggunaan dilempar dengan tangan, untuk melawan militer Rusia. Akibat kondisi yang semakin kacau, pemerintah Ukraina memutuskan untuk mengirim ribuan senjata api agar digunakan oleh masyarakat yang bersedia menjadi *volunteer* dalam mempertahankan Kyiv dari invasi militer Rusia (Reuters, 2022).

Kekacauan yang disebabkan oleh militer Rusia menyebabkan banyak masyarakat Ukraina mengecam aksi tersebut. Hal ini sesuai dengan statemen yang diungkapkan oleh Dewan Spiritual Uskup Ryakhovsky, diunggah melalui website keagamaan pada 25 Februari, yang berbunyi:

*“...A terrible thing [has] happened. The fratricidal conflict that has been smoldering in the Donbas for more than eight years has [now] covered a much larger area: explosions are heard, shots are fired, people are dying...”* (Elliott, 2022).

Dalam waktu singkat konflik menjadi semakin signifikan, dimana pada tanggal 26 Februari terjadi lebih dari 40 ledakan dalam waktu kurang dari satu jam di ibukota Kyiv (The Washington Post, 2022). AS menawarkan bantuan evakuasi kepada Presiden Ukraina, namun hal tersebut ditolak. Dibandingkan bantuan evakuasi, Zelenskyy meminta AS untuk membantunya dalam hal amunisi perang (CNN, 2022).

### **Gambar 2.2**

#### **Asap dan api yang berasal dari sebuah bangunan di Kyiv**



*Source: CNN News*

Berbagai kecaman dari negara lain maupun organisasi internasional telah diterima oleh Rusia, salah satunya dilakukan oleh NATO. Hal tersebut tidak menghentikan agresivitas dari serangan Rusia, namun sebaliknya sebagai jawaban atas kecaman NATO, Putin memberlakukan “*special mode of combat service*” (The Guardian, 2022). Interpretasi sederhana dari ungkapan yang dinyatakan oleh Presiden Rusia tersebut adalah pemaksimalan potensi nuklir Rusia sebagai pencegahan atas tindakan lanjutan NATO.

Perwakilan Rusia dan Ukraina melakukan pertemuan di Gomel, Belarus pada tanggal 28 Februari (New York Times, 2022). Namun, pertemuan tersebut

tidak menghasilkan benang merah dari invasi militer yang sedang berlangsung. Disamping itu, Putin memberi syarat untuk menghentikan invasi yaitu dengan adanya demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina serta pengakuan bahwa Krimea merupakan bagian dari wilayah Rusia. Akibat ditolaknya syarat tersebut, Invasi militer Rusia terus berlanjut. Menurut laporan Dmytro Zhyvytsky, Gubernur Sumy, militer Rusia menyerang pangkalan militer Okhtyrka, sebuah kota di antara Kyiv dan Kharkiv, dan menewaskan lebih dari 70 orang militer Ukraina (The Washington Times, 2022).

Pada awal Maret, Presiden Ukraina mengumumkan bahwa relawan internasional telah tiba di Ukraina dan siap untuk membantu perang melawan Rusia. Ia juga menambahkan bahwa negara barat secara teratur memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina (The Hill, 2022). Selanjutnya, Ukraina meminta untuk pemberlakuan *no-fly zone* kepada NATO, namun hal tersebut ditolak dengan alasan akan mengundang perang yang lebih besar dengan Rusia (Aljazeera, 2022). *No-fly zone* atau zona larangan terbang adalah sebuah wilayah yang secara militer dilarang untuk dilewati kendaraan atau segala bentuk kegiatan udara (Long, 2012).

Rusia mengumumkan gencatan senjata untuk mengevakuasi ratusan ribu warga sipil wilayah Mariupol karena adanya krisis air dan listrik pada 5 Maret (Aljazeera, 2022). Sejak invasi militer tercetus, militer Ukraina seakan selalu dalam posisi terbelakang. Namun, pada 7 Maret Ukraina melaporkan bahwa beberapa wilayah yang diduduki militer Rusia telah kembali direbut, bahkan militer Ukraina mampu mengebom pangkalan militer Rusia di wilayah Kherson

(Trevithick & Rogoway, 2022). Melanjutkan terkait proses evakuasi warga sipil, Rusia mengklaim membuka 6 koridor atau akses keluar. Akan tetapi hal tersebut dikritisi oleh pihak Ukraina karena dari 6 akses yang dibuka, hanya 2 akses yang mengarah pada wilayah Ukraina. Sedangkan 4 akses lainnya mengarah keluar ke arah wilayah Rusia ataupun Belarus (The Guardian, 2022).

Memasuki pertengahan Maret, Rusia kembali memperluas area serangan dengan menargetkan wilayah Ukraina barat. Serangan tersebut terjadi pada pangkalan udara militer Ukraina di Lutsk (Hughes & Haynes, 2022). Beberapa hari setelahnya, Rusia menyerang pangkalan militer yang digunakan Ukraina untuk menggelar rapat bersama NATO dan negara anggota NATO lainnya, serta membunuh ratusan tentara bayaran dan menghancurkan senjata yang dikirimkan oleh negara lain (Reuters, 2022). Hal tersebut menyebabkan ketegangan antara Rusia dan NATO semakin memuncak.

Hingga akhir Maret serangan yang dilakukan militer Rusia terus dilakukan. Akan tetapi menurut laporan resmi pertahanan Ukraina, Rusia berhenti menyerang dan berusaha berkumpul di sekitar Kyiv untuk memblokir pasokan bagi militer Ukraina. Pada tanggal 27 Maret, presiden Zelenskyy menyatakan siap melakukan status netral dan *non-nuclear* agar dapat berdamai dengan Rusia (CNN, 2022). Perang terus berlanjut, hingga di awal April Rusia mendaratkan rudal di area Poltava dan Kremenchuk yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan bangunan perumahan (Reuters, 2022). Disatu sisi, wakil menteri pertahanan Ukraina menyatakan bahwa pada tanggal 2 April seluruh wilayah kota Kyiv telah kembali berada dibawah kontrol Ukraina.

Invasi Rusia tentu tidak terlepas dari adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, pada 3 April ditemukan ratusan mayat warga sipil Ukraina yang dikubur massal di daerah Bucha, serta puluhan mayat yang bahkan masih tergeletak dan belum sempat dikuburkan (The Guardian, 2022). Temuan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap HAM. Sebuah organisasi internasional non-pemerintahan, *Human Right Watch*, melaporkan kejahatan perang terjadi di Ukraina yang meliputi pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan bahkan perampasan (Human Right Watch, 2022).

*“Rape, murder, and other violent acts against people in the Russian forces’ custody should be investigated as war crimes.”*

--- Hugh Williamson, *as Europe and Central Asia director at Human Rights Watch* (Human Right Watch, 2022).

Presiden Zelenskyy menyetujui laporan tersebut dan menyebut Rusia telah melakukan genosida pada warga sipil Ukraina, ia merekomendasikan agar sanksi yang dijatuhi oleh negara barat dan organisasi internasional haruslah lebih berat dari yang sebelumnya. Sebagai tanggapan atas invasi yang dilakukan Rusia, pada tanggal 7 April, Rusia dikeluarkan dari *United Nations Human Right Council* oleh majelis umum PBB (Aljazeera, 2022).

Salah satu serangan besar yang dilakukan militer Rusia terjadi pada tanggal 8 April di stasiun Kramatorsk. Akibat serangan rudal pada stasiun yang sedang penuh masyarakat sipil tersebut, setidaknya puluhan orang meninggal dan ratusan korban terluka. Mayat korban meninggal dan koper-koper tanpa pemilik tergeletak di beberapa bagian jalan dan bagian stasiun pasca peristiwa

pengeboman (BBC, 2022). Disamping kematian masyarakat sipil, Rusia mempublikasikan total kematian personil militer Ukraina pada 16 April yang telah mencapai lebih dari 23 ribu jiwa (TASS, 2022). Laporan tersebut merupakan pertama kalinya Rusia mempublikasikan total kematian pada invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022.

Fase kedua dari invasi Rusia resmi dimulai pada April 2022, dalam fase kedua ini fokus utama dari militer Rusia adalah untuk merebut Donbas dan Ukraina selatan (Aljazeera, 2022). Serangan di wilayah Donbas secara resmi dimulai pada 18 April, diumumkan oleh presiden Zelenskyy (The Hill, 2022). Serangan tersebut dikenal dengan nama *Battle of Donbas*. Rusia mulai menjalankan kebijakannya pada wilayah Ukraina yang sudah berhasil diduduki, salah satunya adalah Kherson. Sebagai contoh, masyarakat Kherson diperintahkan oleh Rusia untuk mulai menggunakan mata uang *ruble*, yaitu mata uang Rusia, pada 28 April 2022 (Evans, 2022).

Igor Konashenkov, perwakilan kementerian pertahanan Rusia, pada 7 Juli memberikan pernyataan bahwa invasi Rusia di Ukraina saat ini sedang dalam fase “*operational pause*” dengan tujuan untuk mengistirahatkan dan membangun kembali serangan militer agar nantinya serangan yang dilakukan selanjutnya dapat berjalan secara maksimal (Hird et al., 2022). Jeda tersebut tidak berlangsung lama, sekitar satu minggu kemudian Rusia mengumumkan telah mengakhiri *operational pause*. Operasi militer dilanjutkan dengan serangan yang difokuskan pada wilayah Donetsk dan Donbas (BBC, 2022).



Bantuan internasional terus diterima oleh Ukraina, salah satunya adalah bantuan yang berasal dari Amerika Serikat di awal bulan Agustus senilai lebih dari 15 milyar rupiah (Reuters, 2022). Sedangkan Rusia menerima tawaran bantuan dari Korea Utara berupa 100.000 pasukan perang yang siap membantu dalam invasi Ukraina, namun Putin mengklaim belum mengambil keputusan apakah akan menerima bantuan tersebut atau tidak (New York Times, 2022).

Disamping serangan Rusia di teritorial Ukraina, Krimea yang merupakan wilayah sengketa menjadi target dari serangan Ukraina pada pertengahan Agustus 2022. Hal ini dilakukan oleh militer Ukraina untuk menghancurkan garis serang serta perlengkapan perang yang dimiliki oleh Rusia (New York Times, 2022). Di akhir Agustus, peneliti dari *Yale School of Medicine* menyatakan bahwa terdapat kamp di wilayah Donetsk yang diduga dibangun untuk melakukan interogasi, penyaringan, penahanan, dsb atas masyarakat Ukraina yang ditahan oleh militer Rusia (Yale, 2022).

Rusia menutup pasokan gas kepada Eropa dengan mengatakan bahwa terdapat kerusakan pada *Nord Stream 1* dan perlu adanya perbaikan pada awal September (BBC, 2022). Hal tersebut akan berdampak pada kenaikan harga gas alam yang diperlukan oleh masyarakat Eropa khususnya ketika musim dingin telah tiba. Beberapa pakar ekonomi berpendapat hal tersebut merupakan salah satu cara Rusia membalas Eropa atas sanksi-sanksi yang dijatuhkan sejak awal invasi dicetuskan. September juga menjadi bulan dimana Ukraina mulai melakukan serangan balasan dan bahkan mengambil kembali wilayah yang sudah sempat diduduki oleh Rusia. Menyusul hal tersebut, Putin mengumumkan

pemberlakuan *partial mobilization*. Dimana masyarakat dengan usia, kesehatan, dan catatan militer yang baik serta dikhususkan memiliki pengalaman militer sebelumnya akan dipanggil untuk membantu militer Rusia sebagai pasukan cadangan (The Jerusalem Post, 2022).

Ukraina secara dinamis mulai melakukan serangan balasan sejak September, dan hasilnya mulai terlihat pada Oktober dimana Ukraina berhasil merebut kembali salah satu kota yang sempat diduduki oleh Rusia, yaitu Lyman (Gambrell & Schreck, 2022). Bahkan beberapa hari setelahnya, militer Ukraina kembali membebaskan sebagian besar kota Kharkiv dari invasi yang dilakukan Rusia. Pemukiman penduduk Kharkiv yang dibebaskan Ukraina yaitu Pidlyman, Nyzhe Zolone, Nyznya Zhuravka, Shyikivka dan Borova (EuroWeekly, 2022). Tidak ingin menyerah, Rusia melakukan serangan balasan dengan mengirimkan rudal dalam jumlah besar, salah satunya di wilayah Kyiv, dan hal tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia (New York Times, 2022). Kekacauan yang disebabkan oleh serangan Rusia pada bulan Oktober sangatlah besar bahkan menjadi salah satu serangan terbesar sejak Februari 2022. Serangan tersebut mendorong presiden Ukraina menyatakan tidak akan ada negosiasi kembali dengan Rusia melalui akun Twiternya pada 18 Oktober 2022:

*“...No space left for negotiations with Putin's regime”*

--- Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa)

Pada akhir Oktober, serangan militer Rusia mulai menargetkan infrastruktur negara dan menyebabkan kehancuran pada pemukiman penduduk, serta berdampak pada kelangkaan air dan listrik di beberapa wilayah Ukraina

(CNN, 2022). Serangan tersebut dimulai dengan menggunakan rudal, yang mana dianggap sebagai pelanggaran perang karena menyasar wilayah masyarakat sipil (Amnesty International, 2022). Hingga akhir tahun 2022, Rusia dan Ukraina saling menyerang dengan fokus pada pangkalan militer di masing-masing negara (Forbes, 2022).

Di awal tahun 2023, tepatnya pada 2 Januari, Ukraina mengumumkan telah membunuh ratusan militer Rusia melalui serangan rudal. Klaim tersebut juga disertai dengan pernyataan bahwa Ukraina telah merusak beberapa senjata roket yang dimiliki Rusia (BBC, 2023). Hingga akhir Februari, tidak terdapat serangan besar baik dari pihak Rusia maupun Ukraina. Beberapa serangan yang terjadi berupa penembakan *drone* milik musuh dan kecaman-kecaman dari berbagai negara kepada Rusia.

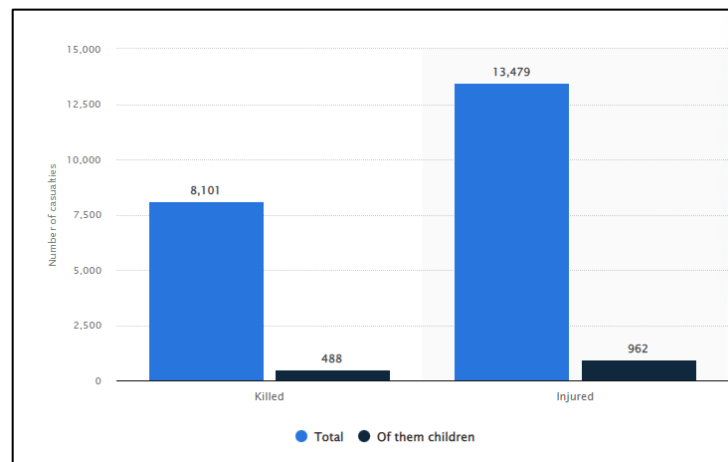
Setelah satu tahun lebih berjalannya Invasi Rusia terhadap Ukraina, *Statista Research Department* melaporkan lebih dari 8.000 masyarakat sipil Ukraina telah menjadi korban sejak awal berlangsungnya serangan militer (Statista Research Department, 2023). Laporan tersebut dikonfirmasi oleh *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) yang mengatakan bahwa data angka tersebut dapat lebih tinggi dalam kenyataan di lapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa korban hilang belum sempat diidentifikasi. Untuk korban terluka, laporan tersebut menyatakan bahwa lebih dari 13 ribu masyarakat sipil terluka dimana lebih dari 7% dari total yang dilaporkan merupakan anak-anak. Sedangkan untuk angka kematian masyarakat

sipil Ukraina, lebih dari 6% dari total kematian tersebut merupakan anak-anak.

Secara statistika, data kematian dan korban luka dari pihak Ukraina yaitu:

**Gambar 2.3**

**Jumlah korban sipil Ukraina dalam invasi Rusia selama 24 Februari 2022  
hingga 26 Februari 2023**



*Source: Statista Research Department*

Jumlah dari masyarakat sipil Ukraina yang menjadi korban kebijakan Invasi militer Rusia terhitung sangat banyak. Namun disamping itu, korban dari pihak militer Rusia yang dilaporkan oleh CSIS (*Center for Strategic & International Studies*) menjadi jumlah paling banyak yang pernah tercatat selama perang yang diikuti oleh Rusia, bahkan melebihi korban yang meninggal secara enumerasi dari awal Rusia melakukan perang hingga perang dunia II (Jones et al., 2023).

*“According to CSIS estimates, there have been approximately 60,000 to 70,000 Russian combat fatalities in Ukraine between February 2022 and February 2023.”* (Jones et al., 2023).

Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar mengingat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina di tahun 2014 hanya mencatatkan angka kematian militer Rusia sebanyak 6.000-7.000 jiwa, atau dalam kata lain hanya 10% dibandingkan kematian militer Rusia yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Walaupun Rusia terhitung memiliki keunggulan di bidang populasi, militer, bahkan ekonomi dibanding Ukraina, hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa perang akan dimenangkan oleh pihak Rusia. Tentu bantuan internasional yang diberikan berbagai negara serta organisasi internasional terhadap Ukraina juga menjadi poin penting akan berlangsungnya serangan balasan oleh Ukraina sehingga mencatatkan kematian militer Rusia yang sangat tinggi tersebut.

Selama kebijakan militeristik Rusia terhadap Ukraina diberlakukan, terdapat banyak wilayah yang diklaim berhasil dikontrol atau diduduki oleh Rusia. Sekalipun beberapa diantaranya berhasil direbut kembali oleh Ukraina (ISW, 2023).

#### Gambar 2.4

#### Gambaran peta teritorial invasi Rusia pada 1 Maret 2023



### Keterangan:

	Russian-controlled Ukrainian Territory before February 24
	Assessed Russian Advances in Ukraine
	Assessed Russian-controlled Ukrainian Territory
	Claimed Ukrainian Counteroffensives
	Reported Ukrainian Partisan Warfare
	Claimed Russian Control over Ukrainian Territory

*Source: Institute for the Study of War*

### 2.3 Faktor Invasi Rusia Dalam Pendekatan Eurosentrisme

Menurut Marvin Kalb dalam bukunya yang berjudul “*Imperial Gamble: Putin, Ukraine, and the New Cold War*” aneksasi Krimea di tahun 2014 merupakan langkah awal Putin untuk menyatukan kembali negara pecahan Uni Soviet untuk nantinya berada dibawah kedaulatan Rusia (Kalb, 2015). Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat beberapa ahli politik yang menyatakan bahwa Invasi Rusia terhadap Ukraina merupakan cara untuk mengembalikan kejayaan Rusia ketika masa Uni Soviet belum hancur.

Terdapat beberapa bukti yang menjadi dasar dalam sudut pandang yang cukup populer tersebut, pertama adalah pernyataan Putin yang menyiratkan bahwa dia menganggap Ukraina sebagai negara yang tidak nyata atau palsu, dan kedua adalah ketika Putin mengatakan bahwa masyarakat Rusia dan Ukraina adalah kesatuan dengan unsur budaya yang mengikat. Dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin seakan mengisyaratkan bahwa Ukraina merupakan satu kesatuan dengan Rusia dan perlu adanya integrasi di bawah kepemimpinan Rusia (BBC, 2022).

Menurut Ingrid W Brunk dan Monica Hakimi, dalam jurnalnya yang berjudul “*Russia, Ukraine, and the Future World Order*”, kebijakan Putin untuk menginvasi Rusia memiliki berbagai dimensi motif, dimana salah satunya adalah sejarah dan identitas. Brunk dan Hakimi juga menyatakan bahwa kekhawatiran Rusia akan perubahan identitas Ukraina akibat dorongan dan pengaruh barat juga menjadi alasan mengapa kebijakan militeristik tersebut tercetus. Menurutnya, dengan adanya kerjasama antara Ukraina dan negara barat, Ukraina akan berada dibawah kontrol negara barat (Brunk & Hakimi, 2022).

Sudut pandang lain mengenai Invasi Rusia terhadap Ukraina disampaikan oleh seorang ahli ilmu politik, John J Mearsheimer. Menurut Mearsheimer, perang yang terjadi di tahun 2022 memiliki intensitas lebih tinggi daripada konflik yang terjadi di tahun 2014 (Mearsheimer, 2022). Ia berpendapat bahwa terdapat pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab atas pecahnya perang yang mempengaruhi kondisi ekonomi global sehingga menjadi salah satu penyebab utama krisis ekonomi global. Rusia dalam hal ini bertanggung jawab sebagai pihak yang memulai konflik, namun kausalitas antara kebijakan Putin dan dorongan lain dibalik itu juga layak diperhatikan untuk menganalisis mengenai kebijakan militeristik Rusia yang akhirnya tercetus di tahun 2022.

Amerika Serikat dipandang memiliki peran untuk bertanggung jawab atas eskalasi konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Mearsheimer mengatakan bahwa Amerika Serikat mendorong kebijakan politiknya kepada Ukraina sehingga menimbulkan kekhawatiran dari sudut pandang Rusia yang membuat Ukraina dipandang sebagai kemungkinan ancaman dimasa depan jika dibiarkan.

Dorongan Amerika Serikat agar Ukraina bergabung ke dalam NATO dan menjadi benteng negara barat atas Rusia menjadi awal mula Putin mendeklarasikan kebijakan militeristiknya untuk menginvasi Ukraina. Sebelum Putin mendeklarasikan invasi terhadap Ukraina, pihak Barat sudah terlebih dahulu mempersiapkan kemungkinan melawan Rusia melalui perang.

Negara barat, dalam hal ini Amerika Serikat, dianggap Mearsheimer acuh dengan menjadikan Ukraina sebagai pion dalam mengalahkan Rusia. Bahkan setelah perang tercetus dan masyarakat Ukraina mengalami penderitaan berat atas invasi Rusia, terdapat anggapan bahwa AS dan sekutunya tidak secara serius mencari jalan diplomasi untuk menghentikan perang yang berlangsung. Secara tersirat, Mearsheimer berpendapat bahwa Amerika Serikat menjadikan Ukraina sebagai “umpan” untuk mengalahkan Rusia melalui perang, yang mana hal tersebut semakin membawa Ukraina turun kedalam jurang penderitaan (Mearsheimer, 2022).

Sejalan dengan pendapat dari Mearsheimer, seorang akademisi Rusia Ivan Safranchuk, menulis sebuah jurnal yang membahas unsur politik dari invasi Rusia di Ukraina pada tahun 2022. Unsur politik tersebut yaitu perluasan NATO (*North Atlantic Treaty Organizations*) dan dominasi Amerika Serikat dalam tatanan global. Safranchuk menjabarkan pendapatnya melalui sudut pandang Rusia, dengan menggunakan pendekatan sejarah.

Melalui sudut pandang Rusia, NATO memiliki peran penting dalam meletusnya perang yang terjadi di Ukraina karena kekhawatiran akan upaya perluasan NATO yang dianggap sebagai penguatan dominasi Barat dalam bidang



politik militer secara global (Safranchuk, 2022). Rencana Ukraina untuk bergabung NATO sebenarnya sudah dicetuskan pasca aneksasi Krimea di tahun 2014, atau bahkan jauh sebelum itu (NATO, 2022), namun pada awal tahun 2022 hal tersebut menjadi gerbang pembuka ketegangan yang terjadi antara kedua negara.

Rusia pada tahun 2021 telah menggunakan cara diplomatik untuk menolak perluasan NATO dengan meminta diskusi formal dalam rangka membahas bidang keamanan di wilayah Eropa, namun cara diplomatik tersebut tidak disetujui oleh NATO (Safranchuk, 2022). Jika melakukan kilas balik, NATO mulai melakukan perluasan pada tahun 1990-an dengan mengadopsi sistem “*Open Door Policy*”. *Open Door Policy* adalah sebuah kebijakan yang menginisiasi keadilan dalam perdagangan dan investasi dengan menjamin hak teritorial dari sebuah negara (Britannica, 2022).

Perluasan infrastruktur militer NATO semakin mendekat dengan perbatasan Rusia. Seakan dengan sengaja menguji Rusia, pada tahun 2000-an politisi barat mencetuskan ide untuk menjadikan Ukraina dan Georgia sebagai anggota baru NATO (Lazarević, 2009). Rusia kembali memperingatkan NATO tentang perluasan militernya yang mendekat dengan perbatasan wilayah Rusia, namun NATO menolak dengan menyampaikan bahwa bergabung dengan suatu organisasi internasional merupakan kebebasan negara manapun dan itu merupakan hak yang mutlak (Rühle, 2014).

Putin juga mengakui bahwa kekhawatiran Ukraina akan bergabung dengan NATO menjadi salah satu alasan aneksasi Krimea di tahun 2014 (Putin, 2014). Pada tahun 2022, pernyataan Ukraina bergabung dengan NATO tentu mengaktifkan “*red*

*line*” atau garis merah yang selama ini dibangun oleh Rusia. Oleh karena itu, perluasan NATO khususnya di wilayah Ukraina menjadi salah satu alasan kebijakan invasi militer diberlakukan Rusia di tahun 2022.

Selain perluasan NATO, dominasi Amerika Serikat dalam tatanan global juga menjadi unsur politik yang penting dalam membahas kebijakan militeristik Rusia di tahun 2022 (Safranchuk, 2022). Bukan menjadi sebuah rahasia bahwasannya Rusia merupakan salah satu negara yang menolak dominasi barat. Rusia selama ini diketahui melakukan pertentangan dengan kepemimpinan AS dalam hegemoni global. Hal ini dibuktikan dengan pengabaian Rusia terhadap hukum internasional, intervensi politik, dan tidak menghormati kebijakan dari barat, khususnya AS.

Rusia cenderung mendukung sistem multipolar dalam tatanan dunia, dimana hukum internasional diciptakan untuk mendorong kepentingan sebuah negara berdaulat tanpa adanya campur tangan pemimpin lain yang memiliki motif tertentu di belakangnya (Tsygankov & Tsygankov, 2021). Secara sederhana, sistem multipolar berarti pembagian kekuatan dunia dimana terdapat lebih dari 2 negara untuk memiliki kesetaraan kekuatan besar yang terdapat di dunia (Turner, 2009). Dengan adanya wacana Ukraina akan bergabung NATO, hal ini menandakan semakin dekatnya hubungan antara Ukraina dan barat, khususnya AS. Melalui sudut pandang Rusia, hal ini akan semakin menguatkan kedudukan AS dalam sistem tatanan global (Safranchuk, 2022).

Ivan Safranchuk melanjutkan penjelasan dengan mengatakan bahwa kebijakan militeristik Rusia terhadap Ukraina merupakan “kebutuhan”

dibandingkan dengan keinginan. Dalam jurnal berjudul “*The Conflict in Ukraine: Regional and Global Contexts – A Perspective from Russia*” ia menuliskan:

*“Russia felt being forced to make unjustified unilateral concessions or forcefully rebel against the Western unfair play on the regional and global levels of world politics. Importantly, Russia takes the military action in Ukraine as ‘forced’, as an act of necessity rather than choice”.* (Safranchuk, 2022).

Pendapat-pendapat tersebut ditentang oleh seorang ilmuwan politik, Taras Kuzio. Melalui analisisnya, orang-orang dengan pendapat yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh John Mearsheimer dan Ivan Safranchuk kurang memberikan bukti konkrit atas tuduhan yang diberikan kepada Barat atau organisasi internasional tertentu. Dalam jurnal yang ditulisnya “*Why Russia Invaded Ukraine*”, kebijakan militeristik Putin di tahun 2022 tersebut telah dirancang matang sejak pasca peristiwa aneksasi Krimea di tahun 2014 (Kuzio, 2022).

Menurut Taras Kuzio, Alasan utama dan satu-satunya dari peristiwa invasi Rusia di tahun 2022 yaitu obsesi Putin yang mengatakan bahwa Ukraina merupakan bagian kecil yang hilang dari Rusia. Kuzio merupakan seorang Profesor di Universitas Kyiv Mohyla yang sudah beberapa kali menerbitkan buku dan jurnal yang berhubungan dengan Ukraina. Melalui berbagai analisis dan pengalaman penelitian yang ia miliki, Kuzio menyatakan bahwa Rusia adalah satu-satunya aktor internasional yang bertanggung jawab atas perang yang terjadi.

Argumen lain tentang kausalitas invasi Rusia di Ukraina pada tahun 2022 adalah demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Demiliterisasi dapat dimaknai sebagai upaya pembatasan jumlah pasukan militer, jumlah kendaraan perang, jumlah senjata, latihan militer dengan atau tanpa negara lain, perizinan pasukan asing di teritorial negara, serta pengembangan militer suatu negara (Umland, 2022).

Jika demiliterisasi Ukraina benar terjadi maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional. Dalam pernyataannya terkait invasi militer, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa pemerintah Ukraina melakukan genosida dan ketidakadilan pada masyarakat tertentu, maka demiliterisasi perlu dilakukan untuk menghentikan hal tersebut dan menyelamatkan hak-hak dari masyarakat tertindas (BBC, 2022).

Tujuan demiliterisasi Ukraina tentu ditentang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Menurutnya, hal tersebut tidak pernah ada dalam negosiasi yang dilakukan dengan Rusia. Seperti dalam pernyataan Presiden Ukraina pada 28 Maret 2022 yang berbunyi:

*“We do not discuss ‘denazification’ and demilitarization at all. I said that we will not sit at the negotiating table at all if we talk about some kind of demilitarization, some kind of ‘denazification’. For me, these are completely incomprehensible things”.* (Zelenskyy, 2022).

Faktor *buffer zone* atau zona penyangga juga dianggap menjadi salah satu alasan Putin mencetuskan kebijakan Invasi di tahun 2022. *Buffer zone* dapat diartikan sebagai sebuah wilayah yang terletak diantara dua teritorial atau lebih

yang berfungsi sebagai zona demiliterisasi atau zona perbatasan (The Idioms Dictionary, 2006). Seorang analisa politik yang berasal dari Moskow, Michael Wasiura, menjabarkan bahwa faktor kekhawatiran akan *buffer zone* tumbuh beriringan dengan sejarah panjang Rusia. Menurutnya, *buffer zone* tidak digunakan semata-mata untuk melindungi diri, melainkan untuk memperkuat wilayah dan menghindari ancaman terhadap kedaulatan Rusia (Wasiura, 2021).

Kebijakan militeristik Rusia dapat dipandang melalui berbagai dimensi kausalitas atau motif yang berbeda-beda, tergantung dari perspektif dalam menganalisa kebijakan tersebut. Beberapa ahli politik memandang dengan menggunakan perspektif Rusia, dan beberapa melakukan sebaliknya dengan perspektif Ukraina. Dalam penjelasan diatas, faktor invasi Rusia dijabarkan dengan menggunakan teori Hubungan Internasional Eropasentris, dimana perspektif para akademisi dalam menganalisa kebijakan Rusia dipengaruhi oleh adanya dominasi teori Hubungan Internasional Barat.

**Tabel 2.1** Perspektif Eurosentrisme terhadap invasi Rusia

<b>Teori</b>	<b>Argumen</b>	<b>Tokoh</b>	<b>Judul Karya</b>
Realisme	Kekhawatiran akan ancaman di masa depan, serta ketidaksukaan Rusia atas campur tangan AS di Ukraina	John J. Mearsheimer	<i>“The Cause and Consequences of The Ukraine War”</i>
	Perluasan Nato dan Dominasi AS dalam tatanan dunia	Ivan Safranchuk	<i>“The Conflict in Ukraine: Regional and Global Contexts – A Perspective from Russia”</i>
	Keinginan Demiliterisasi Ukraina	Andreas Umland	<i>“A Neutral and Demilitarized Ukraine? Moscow’s Demands of</i>

			<i>Kyiv in Geostrategic Perspective</i>
	Faktor <i>buffer zone</i> sebagai <i>fundamental threat</i>	Michael Wasiura	<i>“The Ballot, Not the Bullet: Russia’s Pursuit of a Geopolitical Buffer Zone”</i>
Konstruktivisme	Kaitan sejarah, keinginan untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet dibawah kepemimpinan Rusia	Marvin Kalb	<i>“Imperial Gamble: Putin, Ukraine, and the New Cold War”</i>
	Adanya persamaan identitas, budaya, dan sejarah	Ingrid Brunk & Monica Hakimi	<i>“Russia, Ukraine, and the Future World Order”</i>
Liberalisme	Obsesi aktor individu, Vladimir Putin, untuk mengintegrasikan Ukraina	Taras Kuzio	<i>“Why Russia Invaded Ukraine?”</i>

## 2.4 Kesimpulan

Perang antara Rusia dan Ukraina merupakan perang terbesar pasca perang dunia ke II yang terjadi di Eropa. Alhasil perang tersebut menarik atensi masyarakat global sejak awal tahun 2022. Perang ini seringkali dinilai sebagai bentuk eskalasi konflik yang terjadi sejak fenomena aneksasi Krimea. Beberapa analisa penyebab perang Rusia dan Ukraina juga disampaikan oleh berbagai akademisi di bidang hubungan internasional. Diantara analisa tersebut yaitu adanya unsur sejarah, faktor kemiripan identitas, kekhawatiran akan ancaman di masa depan, perluasan NATO, dominasi AS dalam tatanan dunia, obsesi aktor individu, keinginan untuk melakukan demiliterisasi dan denazifikasi, serta faktor *buffer zone*.

Dinamika perang antara Rusia dan Ukraina, serta dampak yang besar dalam sektor kemanusiaan maupun ekonomi global menjadi atensi tersendiri selama perang berlangsung. Beberapa faktor invasi yang cukup populer dikalangan masyarakat global cenderung menggunakan pendekatan Eropasentris. Dibalik berbagai perspektif global dari akademisi yang telah menganalisa kebijakan militer Rusia dengan menggunakan teori Hubungan Internasional Barat. Terdapat beberapa *missing points* dalam analisa yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah tidak melihat dari sudut pandang Rusia. Untuk menganalisa lebih lanjut terkait hal tersebut, bab selanjutnya akan menafsirkan bagaimana Rusia memandang kebijakan invasi ke Ukraina dengan menggunakan teori peradaban Rusia sebagai pisau analisisnya.